Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 10, 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



KAJIAN REFLEKTIF TERKAIT KETIMPANGAN PERAN NEGARA DALAM PENGASUHAN ANAK DI PANTI ASUHAN SWASTA KOTA KUPANG

Fedrita A. Djami[1], Claudia W. Mo'i[2], Oktaviana S. Hibur[3], Paulina V. Daiman[4], Anggreani D. Tiri[5], Lasarus Jehamat[6], Christine E. Meka[7], Lalu Didik Apriawan[8]

12345678 Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana

ARTICLE INFO

Article history:
Received Januari, 2026
Revised Januari, 2026
Accepted Januari, 2026
Available Januari, 2026

ditadjami@gmail.com,
dewimoi202@gmail.com,
oktavianahibur@gmail.com,
vilariadaiman22@gmail.com,
renidjadatiri@gmail.com,
Lasarus.jehamat@staf.undana.ac.id,
christine.e.meka@staf.undana.ac.id,
lalu.apriawan@staf.undana.ac.id

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Cahaya Ilmu Bangsa Institute

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji ketimpangan peran negara dalam penyelenggaraan pengasuhan anak di panti asuhan swasta di Kota Kupang. Meskipun negara memiliki mandat hukum untuk menjamin pemenuhan hak anak, implementasi kebijakan pengasuhan alternatif di tingkat daerah masih lemah dan terfragmentasi. Penelitian ini menggunakan metode *literature review* dengan menelaah jurnal ilmiah, laporan lembaga internasional, serta dokumen kebijakan nasional dan daerah. Analisis dilakukan secara tematik untuk mengidentifikasi pola ketergantungan pada panti asuhan swasta, lemahnya pengawasan dan pendanaan negara, serta implikasinya terhadap kualitas pengasuhan anak. Hasil kajian menunjukkan bahwa dominasi lembaga swasta dalam pengasuhan anak mencerminkan minimnya keterlibatan negara sebagai penyedia, pengawas, dan penjamin standar layanan. Kondisi ini berimplikasi pada ketimpangan kualitas pengasuhan dan meningkatkan kerentanan anak, khususnya dalam aspek kesejahteraan psikososial. Penelitian ini merekomendasikan penguatan peran negara melalui pembinaan, pengawasan, pendanaan berkelanjutan, serta pengembangan pengasuhan alternatif berbasis keluarga.

Kata kunci: pengasuhan anak, peran negara, panti asuhan, literature review, Kota Kupang

ABSTRACT

his study examines the imbalance of the state's role in the provision of child care services in privately managed orphanages in Kupang City. Although the state holds a clear legal mandate to ensure the fulfillment of children's rights, the implementation of alternative care policies at the local level remains weak and fragmented. Employing a literature review method, this study analyzes academic publications, international organization reports, and national and local policy documents. A thematic analysis is used to identify patterns of dependence on private orphanages, limited state supervision and funding, and their implications for the quality of child care. The findings indicate that the dominance of private institutions reflects the limited presence of the state as a service provider, regulator, and guarantor of care standards. This situation contributes to unequal care quality and increases children's vulnerability, particularly in terms of psychosocial well-being. The study recommends strengthening the state's role through systematic supervision, sustainable funding, and the development of family-based alternative care.

Keywords: *child care, state role, orphanages, literature review, Kupang City*

1. PENDAHULUAN

Pengasuhan anak merupakan mandat fundamental negara dalam rangka pemenuhan hak-hak anak sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Negara berkewajiban menjamin bahwa setiap anak memperoleh

*Corresponding author
E-mail addresses: ditadjami@gmail.com

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 10, 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



perlindungan, pengasuhan, dan layanan yang layak, termasuk anak-anak yang berada di luar pengasuhan keluarga. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) menjadi landasan utama dalam setiap kebijakan dan praktik pengasuhan alternatif, sehingga tanggung jawab negara tidak dapat dialihkan sepenuhnya kepada aktor non-negara.

Namun demikian, praktik penyelenggaraan pengasuhan alternatif di Indonesia menunjukkan adanya ketimpangan peran antara negara dan lembaga pengasuhan non-pemerintah, khususnya panti asuhan swasta. Dalam banyak kasus, negara cenderung menyerahkan sebagian besar tanggung jawab pengasuhan kepada lembaga-lembaga tersebut, menjadikan panti asuhan sebagai aktor utama dalam penyediaan layanan pengasuhan alternatif. Kondisi ini tidak hanya mencerminkan keterbatasan kapasitas negara, tetapi juga menunjukkan adanya pengalihan tanggung jawab yang bersifat struktural dalam sistem perlindungan anak.

Ketimpangan peran tersebut tercermin dalam beberapa aspek penting. Pertama, dari sisi pembiayaan, dukungan anggaran publik untuk pengasuhan alternatif relatif terbatas, sehingga panti asuhan swasta sangat bergantung pada donasi masyarakat dan sumber pendanaan tidak tetap. Kedua, dalam aspek pembinaan dan standar pelayanan, pelaksanaan pembinaan, akreditasi, serta penerapan standar pengasuhan oleh pemerintah daerah belum berjalan secara merata dan konsisten. Ketiga, pada aspek pengawasan, lemahnya mekanisme monitoring dan evaluasi menyebabkan variasi kualitas layanan, keselamatan, dan kesejahteraan anak antar panti asuhan. Kondisi ini berdampak langsung pada kualitas pengasuhan, mengingat kapasitas internal panti—baik sumber daya manusia, program psikososial, maupun fasilitas pendukung—sangat menentukan terpenuhinya hak-hak anak.

Berbagai kajian dan laporan praktik menunjukkan bahwa dominasi pengasuhan berbasis institusi tanpa penguatan peran negara berpotensi menimbulkan risiko serius bagi perkembangan anak. Tilbury (2020) serta laporan UNICEF (2019) menegaskan bahwa minimnya keterlibatan negara dalam pengasuhan alternatif dapat menjadikan panti asuhan sebagai lingkungan yang kurang optimal bagi perkembangan emosional, psikologis, dan sosial anak. Risiko tersebut meliputi keterasingan emosional, keterbatasan stimulasi perkembangan, serta kesulitan reintegrasi anak ke dalam keluarga dan masyarakat. Dalam jangka panjang, ketergantungan pada model institusional tanpa pengembangan alternatif berbasis keluarga juga berpotensi meningkatkan kerentanan anak dalam aspek pendidikan, kesehatan mental, dan kesiapan keterampilan hidup.

Konteks lokal di Kota Kupang memperkuat gambaran tersebut. Berdasarkan Profil Gender dan Anak Kota Kupang Tahun 2024 yang diterbitkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), terdapat setidaknya enam panti asuhan swasta yang aktif menyelenggarakan pengasuhan anak, yaitu Panti Asuhan Puri Bunda, Kasih Agape, Petra, Syalom (Yayasan Bina Kasih Sion), Kristen GMIT, dan Guardian Holy. Meskipun data mengenai panti asuhan non-pemerintah belum terdokumentasi secara menyeluruh, keberadaan dan dominasi lembaga swasta tersebut menunjukkan belum optimalnya peran pemerintah daerah dalam fungsi perencanaan, pendanaan, pembinaan, dan pengawasan guna menjamin tersedianya layanan pengasuhan alternatif yang berkualitas dan berkelanjutan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berupaya mengkaji beberapa persoalan kunci, yaitu: (1) konfigurasi relasi kelembagaan antara negara—baik pemerintah pusat maupun daerah—dan panti asuhan swasta dalam ekosistem penyediaan layanan pengasuhan anak; (2) tingkat implementasi kebijakan formal di tingkat nasional dan daerah ke dalam mekanisme konkret pembiayaan, pembinaan, dan pengawasan; (3) determinan sosial-ekonomi yang memperkuat ketergantungan masyarakat terhadap panti asuhan sebagai bentuk pengasuhan alternatif; serta (4) implikasi ketimpangan peran tersebut terhadap pemenuhan hak-hak anak, khususnya dalam dimensi kesejahteraan psikososial, akses pendidikan, dan hak anak untuk berpartisipasi.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 10, 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah tinjauan literatur (*literature review*) yang dipadukan dengan analisis kebijakan (*policy analysis*) serta deskripsi kasus pada tingkat lokal. Melalui penelaahan dokumen kebijakan, standar internasional tentang pengasuhan alternatif, dan temuan empiris yang relevan, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi kesenjangan antara kerangka regulasi formal dan realitas operasional pengasuhan anak di panti asuhan swasta di Kota Kupang. Hasil kajian ini diharapkan dapat memperkaya diskursus akademik mengenai peran negara dalam pengasuhan alternatif, sekaligus memberikan dasar bagi perumusan kebijakan yang lebih responsif dan berbasis hak anak.

Pada akhirnya, relevansi penelitian ini terletak pada potensinya untuk mendukung pemerintah daerah dalam merumuskan strategi pembinaan dan pengawasan panti asuhan swasta yang lebih sistematis, komprehensif, dan berkelanjutan. Dengan memperkuat peran negara dalam pengasuhan alternatif, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada terwujudnya sistem perlindungan anak yang menjamin bahwa anak-anak di luar pengasuhan keluarga memperoleh perlindungan, pengasuhan, dan kesempatan berkembang yang setara dengan anak-anak lainnya.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode *literature review* untuk mengkaji ketimpangan peran negara dalam penyelenggaraan pengasuhan anak di panti asuhan swasta di Kota Kupang. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif dan mendalam mengenai isu yang diteliti tanpa melakukan pengumpulan data primer di lapangan. Melalui *literature review*, penelitian ini memanfaatkan temuan-temuan empiris, kerangka konseptual, serta kebijakan yang telah ada guna menganalisis dinamika pengasuhan anak dan relasi kelembagaan antara negara dan lembaga pengasuhan non-pemerintah.

Sumber data penelitian terdiri atas literatur ilmiah dan dokumen kebijakan yang relevan. Literatur ilmiah meliputi artikel jurnal nasional dan internasional, buku akademik, serta laporan penelitian yang membahas perlindungan anak, pengasuhan alternatif, peran negara dalam layanan sosial, dan pengelolaan panti asuhan. Sementara itu, dokumen kebijakan mencakup peraturan perundang-undangan, laporan lembaga internasional seperti UNICEF, serta data dan publikasi resmi dari instansi pemerintah, khususnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang. Penelusuran literatur dilakukan melalui repositori ilmiah seperti Google Scholar dan SINTA, serta situs resmi lembaga-lembaga terkait.

Literatur yang dikaji mencerminkan kecenderungan global dan nasional yang relevan dengan fokus penelitian. Sejumlah studi internasional menunjukkan bahwa lemahnya regulasi dan minimnya keterlibatan negara dalam pengasuhan alternatif meningkatkan risiko kualitas pengasuhan institusional (Tilbury, 2020; Delap, 2021). Penelitian lain menegaskan bahwa panti asuhan swasta sering beroperasi dengan standar pelayanan yang tidak seragam, yang berdampak pada perkembangan psikososial anak (Martin & Revington, 2020). Dalam konteks Indonesia, temuan Astuti dan Wicaksono (2022) menunjukkan bahwa keterbatasan pembiayaan dan lemahnya koordinasi antarinstansi pemerintah daerah menjadi faktor utama rendahnya kualitas layanan pengasuhan di panti asuhan. Selain itu, laporan UNICEF (2023) menekankan urgensi transisi menuju pengasuhan berbasis keluarga (*family-based care*) sebagai alternatif yang lebih menjamin kesejahteraan emosional dan psikologis anak. Untuk memperkuat konteks lokal, penelitian ini menggunakan Profil Gender dan Anak Kota Kupang Tahun 2024 sebagai rujukan utama dalam menggambarkan kondisi pengasuhan alternatif di wilayah penelitian.

*Corresponding author
E-mail addresses: ditadjami@gmail.com

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 10, 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan analisis tematik. Tahapan analisis meliputi identifikasi, pengelompokan, dan penafsiran tema-tema utama yang muncul dari berbagai sumber literatur dan dokumen kebijakan. Tema-tema tersebut antara lain mencakup peran dan tanggung jawab negara, mekanisme pembiayaan dan pengawasan, kapasitas kelembagaan panti asuhan swasta, serta bentuk-bentuk ketimpangan dalam penyelenggaraan pengasuhan anak. Pendekatan analisis tematik dipilih karena memungkinkan peneliti memetakan keterkaitan antarvariabel dan mengungkap pola-pola struktural yang melatarbelakangi ketergantungan pada panti asuhan swasta.

Dengan mengintegrasikan temuan-temuan empiris dari berbagai sumber, penelitian ini membangun pemahaman reflektif mengenai bagaimana tanggung jawab negara dijalankan dalam praktik, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan peran, serta implikasinya terhadap pemenuhan hak-hak anak. Metode *literature review* yang digunakan juga memungkinkan dilakukannya perbandingan lintas konteks dan wilayah, sehingga penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi permasalahan yang ada, tetapi juga menyediakan dasar konseptual yang kuat bagi perumusan rekomendasi kebijakan yang relevan, kontekstual, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan literatur menunjukkan bahwa ketimpangan peran negara dalam pengasuhan anak tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan keterbatasan kapasitas teknis atau sumber daya administratif. Lebih dari itu, ketimpangan tersebut merupakan persoalan struktural yang berakar pada desain, orientasi, dan praktik sistem kesejahteraan sosial yang belum sepenuhnya menempatkan pengasuhan anak sebagai tanggung jawab publik yang bersifat non-negosiabel. Meskipun negara secara normatif telah dibekali mandat hukum yang jelas untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak—termasuk hak atas pengasuhan alternatif yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*) sebagaimana ditegaskan dalam Konvensi Hak Anak, rekomendasi UNICEF (2019), serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak—implementasi mandat tersebut di tingkat lokal masih bersifat parsial, terfragmentasi, dan tidak merata. Kondisi ini menciptakan ruang struktural bagi menguatnya peran aktor non-negara, khususnya panti asuhan swasta, sementara kehadiran negara cenderung terbatas pada ranah regulatif dan administratif.

Ketimpangan Struktural dalam Sistem Pengasuhan Anak

Literatur kesejahteraan sosial secara konsisten menggarisbawahi bahwa ketimpangan peran negara dalam pengasuhan anak sering muncul ketika tanggung jawab layanan publik dialihkan kepada lembaga non-pemerintah tanpa diiringi dengan dukungan struktural yang memadai, baik dalam bentuk pendanaan, penguatan kapasitas, maupun mekanisme pengawasan yang efektif. Gilbert, Parton, dan Skivenes (2011) menjelaskan bahwa pola tersebut lazim ditemukan dalam rezim kesejahteraan yang menghadapi tekanan fiskal, perubahan paradigma kebijakan sosial, serta lemahnya institusionalisasi standar pelayanan. Dalam situasi demikian, negara tetap mempertahankan mandat normatifnya, tetapi secara praktis menyerahkan fungsi operasional kepada aktor non-negara.

Konteks Indonesia menunjukkan kecenderungan serupa. Meskipun kerangka hukum perlindungan anak relatif komprehensif, implementasinya di tingkat daerah kerap tidak konsisten dan sangat bergantung pada kapasitas serta komitmen pemerintah daerah masing-masing (Harahap, 2022). Akibatnya, sistem pengasuhan alternatif berkembang secara tidak seimbang,

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 10, 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



dengan dominasi model pengasuhan berbasis institusi yang dikelola oleh lembaga swasta atau keagamaan. Rahmawati (2021) menegaskan bahwa ketergantungan yang tinggi terhadap *residential care* mencerminkan belum optimalnya pengembangan layanan pengasuhan berbasis keluarga (*family-based care*), padahal model tersebut secara luas direkomendasikan dalam standar internasional sebagai pendekatan yang lebih ramah terhadap perkembangan anak.

Dengan demikian, ketimpangan peran negara tidak dapat direduksi menjadi persoalan teknis operasional semata, melainkan mencerminkan kelemahan desain kebijakan yang belum sepenuhnya berorientasi pada kebutuhan holistik anak dan belum mampu mengintegrasikan prinsip kepentingan terbaik anak ke dalam praktik kelembagaan secara sistemik (Tilbury, 2020).

Dominasi Lembaga Swasta sebagai Refleksi Minimnya Peran Negara

Dominasi lembaga swasta dalam penyelenggaraan pengasuhan anak di Kota Kupang menjadi ilustrasi konkret dari minimnya keterlibatan negara dalam ranah layanan pengasuhan alternatif. Berdasarkan Profil Gender dan Anak Kota Kupang Tahun 2024, seluruh panti asuhan yang tercatat aktif—yakni Puri Bunda, Kasih Agape, Petra, Syalom (Yayasan Bina Kasih Sion), Kristen GMIT, dan Guardian Holy—dikelola oleh pihak swasta, tanpa satu pun lembaga pengasuhan yang diselenggarakan langsung oleh pemerintah daerah. Fakta ini mengindikasikan tidak hanya absennya negara sebagai penyedia layanan, tetapi juga terjadinya penyerahan tanggung jawab pengasuhan secara de facto kepada aktor non-pemerintah.

Fenomena tersebut sejalan dengan temuan Rokhmansyah (2019) yang menyatakan bahwa di banyak daerah di Indonesia, alokasi anggaran perlindungan anak masih bersifat residual dan belum menjadi prioritas kebijakan. Dalam kondisi demikian, lembaga swasta secara praktis mengambil alih fungsi pengasuhan untuk menutup kekosongan layanan publik. Namun demikian, secara *de jure*, tanggung jawab utama untuk menjamin pemenuhan hak anak tetap berada pada negara. Ketidaksesuaian antara mandat hukum dan praktik lapangan ini memperlihatkan adanya kesenjangan struktural yang signifikan antara peran normatif dan peran faktual negara dalam sistem pengasuhan anak.

Ketimpangan Kualitas Layanan Pengasuhan

Literatur juga menegaskan bahwa minimnya keterlibatan negara berdampak langsung pada ketimpangan kualitas layanan antar panti asuhan. UNICEF (2019) mencatat bahwa banyak lembaga pengasuhan institusional lebih menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan dasar anak, seperti pangan dan tempat tinggal, sementara aspek-aspek pengasuhan yang bersifat non-material—dukungan emosional, pembentukan identitas, relasi sosial yang aman, serta stimulasi perkembangan psikososial—sering kali terabaikan.

Tilbury (2020) menekankan bahwa dalam konteks lemahnya pengawasan negara, kualitas pengasuhan sangat bergantung pada kapasitas internal masing-masing lembaga, termasuk kompetensi pengasuh, stabilitas pendanaan, dan ketersediaan program pendukung. Izwardy (2020) menambahkan bahwa ketergantungan pada donasi membuat banyak panti asuhan menghadapi ketidakpastian finansial, yang pada gilirannya berdampak pada keberlanjutan dan konsistensi layanan. Kondisi ini relevan dengan situasi di Kota Kupang, di mana perbedaan sumber daya dan jejaring pendukung antar panti berpotensi menciptakan disparitas kualitas pengasuhan yang signifikan.

Kesenjangan antara Regulasi dan Praktik Lapangan

*Corresponding author
E-mail addresses: ditadjami@gmail.com



Walaupun Indonesia memiliki berbagai regulasi yang mengatur pengasuhan alternatif, implementasi kebijakan tersebut sering kali tidak didukung oleh instrumen teknis yang memadai. Harahap (2022) menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan perlindungan anak di tingkat daerah sangat bergantung pada kapasitas institusional, ketersediaan sumber daya manusia, serta mekanisme pengawasan yang jelas. Ketiadaan sistem evaluasi terstandar, minimnya tenaga pengawas, dan lemahnya penganggaran berkontribusi pada terbentuknya *implementation gap* antara regulasi dan praktik.

Kesenjangan ini menyebabkan panti asuhan swasta berperan sebagai aktor utama dalam pengasuhan anak, sementara negara cenderung hadir secara simbolik melalui regulasi, tanpa keterlibatan substantif dalam operasional sehari-hari. Dengan kata lain, negara menjalankan fungsi normatif, tetapi absen dalam fungsi protektif dan korektif yang seharusnya melekat dalam sistem kesejahteraan anak.

Implikasi bagi Kota Kupang dan Relevansi Temuan

Dalam konteks Kota Kupang, hasil tinjauan literatur menunjukkan bahwa ketimpangan peran negara tidak hanya disebabkan oleh ketiadaan fasilitas pengasuhan milik pemerintah. Lebih jauh, kondisi tersebut mencerminkan persoalan tata kelola perlindungan anak yang belum terpadu, di mana fungsi perencanaan, pendanaan, pembinaan, dan pengawasan belum dijalankan secara optimal dan terintegrasi.

Temuan ini mengindikasikan bahwa: (a) negara belum menjalankan peran sentralnya sebagai penjaga standar dan penjamin kualitas pengasuhan; (b) lembaga swasta menanggung beban operasional yang tidak proporsional tanpa dukungan struktural yang memadai; dan (c) anak berada dalam posisi rentan, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan emosional, psikologis, dan sosial yang esensial bagi tumbuh kembangnya.

Berdasarkan kajian tersebut, penguatan peran pemerintah daerah menjadi krusial, terutama melalui pembinaan dan pengawasan reguler terhadap panti asuhan, standarisasi layanan berbasis kebutuhan perkembangan anak, pendataan menyeluruh terhadap lembaga pengasuhan swasta, serta penguatan skema pendanaan publik. Selain itu, pengembangan layanan pengasuhan alternatif berbasis keluarga perlu diprioritaskan sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk memastikan bahwa sistem pengasuhan anak benar-benar berorientasi pada kepentingan terbaik anak dan selaras dengan prinsip-prinsip kesejahteraan sosial yang berkeadilan.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Kajian ini menunjukkan bahwa ketimpangan peran negara dalam penyelenggaraan pengasuhan anak di Kota Kupang merupakan persoalan struktural yang berakar pada lemahnya implementasi kebijakan perlindungan anak di tingkat daerah. Meskipun negara memiliki mandat hukum yang kuat untuk menjamin pemenuhan hak anak, peran tersebut belum terwujud secara optimal dalam bentuk penyediaan layanan, pendanaan, pembinaan, dan pengawasan pengasuhan alternatif. Akibatnya, panti asuhan swasta menjadi aktor utama dalam sistem pengasuhan anak, dengan kualitas layanan yang sangat bergantung pada kapasitas internal masing-masing lembaga. Kondisi ini menimbulkan ketimpangan layanan dan meningkatkan kerentanan anak, khususnya dalam aspek kesejahteraan psikososial dan pemenuhan hak-hak dasar non-material.

Saran

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 10, 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Pemerintah daerah perlu memperkuat peran strategisnya melalui pengawasan dan pembinaan rutin terhadap panti asuhan dengan standar layanan yang jelas dan terukur. Selain itu, diperlukan penguatan dukungan pendanaan negara serta pengembangan sistem pengasuhan alternatif berbasis keluarga sebagai prioritas kebijakan. Pendataan yang komprehensif dan sistem evaluasi berkelanjutan juga penting untuk memastikan kualitas pengasuhan yang adil, aman, dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak.

5. DAFTAR PUSTAKA

Astuti, R., & Wicaksono, A. (2022). *Tantangan Pengasuhan Anak di Lembaga Pengasuhan Sosial: Analisis Kualitas Layanan dan Peran Pemerintah Daerah*. Jurnal Perlindungan Anak Indonesia, 5(2), 110–124.

Badan Pusat Statistik. (2020). *Statistik kesejahteraan rakyat Indonesia*. BPS.

Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik kesejahteraan rakyat*. BPS.

Bessant, J. (2018). *Governing Vulnerable Children: Governmentality and Child Protection*. Routledge.

Brown, K. (2022). *Child Welfare and the State: Rethinking Institutional Care in Contemporary Social Policy*. Social Policy & Administration, 56(4), 612–627.

Delap, E. (2021). *Unregulated Care and Risks to Children: A Global Review of Institutional Childcare*. Child Abuse & Neglect, 115, 104–180.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang. (2024). *Profil gender dan anak Kota Kupang 2024*. DP3A Kota Kupang.

DP3A Kota Kupang. (2024). *Profil Gender dan Anak Kota Kupang Tahun 2024*. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang.

Foucault, M. (1991). *Governmentality*. In G. Burchell, C. Gordon, & P. Miller (Eds.), The Foucault Effect: Studies in Governmentality (pp. 87–104). University of Chicago Press.

Gibbons, J., & Gray, M. (2020). *State Responsibility and the Politics of Child Protection: A Critical Policy Review*. Children and Youth Services Review, 114, 105–143.

Gilbert, N., Parton, N., & Skivenes, M. (2011). *Child protection systems: International trends and orientations*. Oxford University Press.

Harahap, S. (2022). Implementasi kebijakan pengasuhan alternatif di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Sosial, 7*(2), 115–130.

Izwardy, D. (2020). Tantangan pengasuhan anak di lembaga pengasuhan Indonesia. *Jurnal Perlindungan Anak Indonesia, 5*(1), 45–60.

Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2011). *Pedoman pengasuhan berbasis keluarga*. Kemensos RI.

Li, T. M. (2007). *The Will to Improve: Governmentality, Development, and the Practice of Politics*. Duke University Press.

MacLeod, J., Williams, A., & McArthur, M. (2020). *Strengthening Government Accountability in Alternative Care Systems: Evidence from Comparative Child Welfare Studies*. Child & Family Social Work, 25(4), 899–910.

Martin, F., & Revington, J. (2020). *Institutional Care and Child Development Outcomes: Variations in Quality and State Responsibility*. International Journal of Child and Adolescent Social Policy, 12(1), 45–62.

Nikku, B. R. (2019). *Child Rights, Social Policy, and State Accountability in South and Southeast Asia*. International Social Work, 62(2), 567–580.

*Corresponding author
E-mail addresses: ditadjami@gmail.com



Pösö, T., Skivenes, M., & Falch-Eriksen, A. (2018). *Child Protection Systems: International Trends and Emerging Ideologies*. Child & Family Social Work, 23(3), 381–389.

Rahman, K. S. (2019). *Constructing Social Care: The Governance of Welfare and Marketized Child Services in Southeast Asia*. Journal of Asian Public Policy, 12(2), 245–263.

Rahmawati, A. (2021). Transformasi pengasuhan alternatif di Indonesia. *Jurnal Sosial dan Kesejahteraan, 12*(4), 301–315.

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Sekretariat Negara.

Rokhmansyah, A. (2019). Peran pemerintah daerah dalam pengasuhan anak di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik, 6*(1), 55–68.

Tilbury, C. (2020). Accountability in child protection systems. *Child Abuse & Neglect, 103*, 104430.

Tilbury, C. (2020). *Child protection, out-of-home care, and the role of the state*. Routledge.

Tilbury, C. (2020). *Rethinking State Responsibility in Out-of-Home Care*. Children and Youth Services Review, 118, 105–219.

UNICEF. (2019). *Guidelines for the alternative care of children*. UNICEF Publications.

UNICEF. (2019). *Reform of alternative care in Indonesia: Policy review and recommendations*. UNICEF Indonesia.

UNICEF. (2023). *Reimagining Alternative Care: Global Report on Family-Based Care and Institutional Reform*. UNICEF Global Office.

Wallace, C., & Pease, B. (2020). *Neoliberal Governmentality and the Restructuring of Child Welfare: Implications for Institutional Care*. Critical Social Policy, 40(3), 370–389.

Winter, K. (2021). *The State, Families, and Care Institutions: A Critical Examination of Alternative Care Policies*. Child & Family Social Work, 26(2), 220–231.

Wright, K., & Connolly, M. (2021). *Repositioning the State in Child Protection: Rethinking Care, Oversight, and Governance*. British Journal of Social Work, 51(7), 2538–2553.